

REPRESENTASI ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH TINGKAT SMA SEDERAJAT DI KALIMANTAN TIMUR

Purwoko¹, Ahmad Fauzi², Laili Komariah³, Lambang Subagio⁴, Warman⁵
Universitas Mulawarman¹, Universitas Mulawarman², Universitas Mulawarman³,
Universitas Mulawarman⁴, Universitas Mulawarman⁵
Pos-el: pwoko180@gmail.com¹, achmaedfauzy@gmail.com²,
laili.komariyah@fkip.unmul.ac.id³, lambang.subagio@fkip.unmul.ac.id⁴,
warman@fkip.unmul.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi arah kebijakan pendidikan yang diterapkan di Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang SMA/ sederajat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap pengambil kebijakan di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, kepala sekolah, serta guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan pendidikan di Kalimantan Timur menekankan pada peningkatan kompetensi guru, digitalisasi sekolah, dan pemerataan akses pendidikan. Kendala utama dalam implementasi kebijakan adalah ketimpangan infrastruktur antar wilayah dan kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik. Rekomendasi diberikan dalam bentuk penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan anggaran pendidikan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap program-program unggulan daerah.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Mutu Pendidikan, SMA, Kalimantan Timur, Digitalisasi Sekolah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the representation of educational policy directions implemented in East Kalimantan Province to improve the quality of education at the senior high school/ equivalent level. The research method used is qualitative descriptive with a document study approach and in-depth interviews with policymakers at the East Kalimantan Provincial Education Office, school principals, and teachers. The findings indicate that the educational policy direction in East Kalimantan emphasizes enhancing teacher competencies, school digitalization, and equal access to education. The primary obstacles in implementing the policy are disparities in infrastructure across regions and the lack of ongoing training for educators. Recommendations are made in the form of strengthening cross-sector collaboration, increasing the education budget, and continuous evaluation of regional flagship programs.

Keywords: Education Policy, Quality of Education, High School, East Kalimantan, School Digitalization.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional. Mutu pendidikan menjadi

indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Timur, tantangan dalam meningkatkan

mutu pendidikan masih cukup signifikan, terutama di tingkat SMA/ sederajat, berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, namun hasil yang dicapai belum merata.

Arah kebijakan pendidikan di daerah harus sesuai dengan kebijakan nasional, namun juga harus mempertimbangkan konteks lokal seperti kondisi geografis, sumber daya manusia, dan sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada bagaimana kebijakan pendidikan di Kalimantan Timur direpresentasikan dan diimplementasikan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di tingkat SMA/ sederajat.

Samarinda merupakan ibu kota dari Kalimantan Timur. Kota Samarinda memiliki jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, wilayah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Kutai-Kartanegara, kota Samarinda ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan juga termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Samarinda, Sanga Sanga, Muara Jawa dan Balikpapan. Kota Samarinda memiliki luas wilayah 718 km² yang dialiri oleh Sungai Mahakam, yang merupakan sungai kedua terbesar di pulau Kalimantan.

Dari data statistik pada tahun 2016, jumlah penduduk Kota Samarinda yang tercatat sebanyak 828.803 ribu jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 428.155 jiwa dan perempuan sebanyak 400.148 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,93%, sehingga kepadatan penduduk Kota Samarinda sebesar 1.147 jiwa/km², penduduk kota Samarinda bekerja pada sektor perekonomian utama yang menyerap tenaga kerja yaitu sektor perdagangan dan jasa.

Pentingnya pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Samarinda, terlihat dari janji politik Gubernur Rudy

Masud yang menyatakan perlunya lebih meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan sumber daya manusia yaitu meningkatkan kemampuan guru dan instruktur melalui Pendidikan gratis poll, hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah setempat dalam memajukan Pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang mengungkapkan kejadian yang ada di lokasi penelitian secara menyeluruh melalui pengumpulan data secara alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, dokumen resmi dari Dinas Pendidikan Kalimantan Timur, serta wawancara dengan kepala sekolah dan staf IT di beberapa sekolah negeri dan swasta di Samarinda dan Balikpapan

Dengan demikian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif pada Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang mutu Pendidikan di Kalimantan Timur. Melalui penelitian kualitatif ini peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti (Sugiyono, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pendidikan di Kalimantan Timur

Pengelolaan pendidikan Kalimantan Timur dapat dilihat dari aspek perencanaan, penataan,

penyelenggaraan, dan pengendaliannya. Kebijakan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun, terbitnya Perda No. 3/2010, Peluncuran Beasiswa Kalimantan Timur Cemerlang dan dilanjutkan Beasiswa Kalimantan Timur Tuntas, dan pembangunan berbagai sarana pendidikan dapat disebut starting point dari sebuah perencanaan untuk tujuan jangka panjang. Begitu pula di aspek penataan, telah jelas pembagian kerja masing-masing di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan satuan tugas (*task force*) dalam kesatuan kendali oleh Gubernur Kalimantan Timur. Pada aspek pelaksanaan, dipilih personil-personil khusus dengan prinsip *the right man on the right place*, kombinasi antara birokrasi dan akademisi. Adapun pengendaliannya secara intens melibatkan Dewan Pendidikan dan DPRD. Pertanyaan tentang pengelolaan pendidikan berarti pula bertanya bagaimana pengelolaan pada faktor-faktor penentu kualitas pendidikan. Matriks di bawah ini dapat menjadi gambaran secara kualitatif bagaimana konsistensi Kalimantan Timur dalam mengelola pendidikannya. Pun jika dikaitkan dengan rencana keberadaan IKN, semua itu menjadi support serta berpotensi untuk berkembang lebih jauh. Dalam matriks Tabel 1, tergambar secara sederhana dinamika upaya peningkatan kualitas di jenjang Dikdasmen. Jumlah sekolah keseluruhan ada 3.468: SD sebanyak 2.062 sekolah, SMP sebanyak 867 sekolah, SMA sebanyak 318 sekolah; dan SMK sebanyak 221 sekolah. Adapun jumlah PTN/PTS di Kalimantan Timur adalah 7 PTN dan 66 PTS. Dari pengamatan dan diskusi dengan sejumlah pimpinan PTN/PTS yang ada di Kalimantan Timur, pada umumnya mereka optimis terhadap upaya pengembangan institusinya juga terhadap program pemerintah, termasuk Nusantara sebagai IKN. Apa yang diuraikan di atas merupakan gambaran umum dan sederhana tentang wajah pendidikan dan

potensinya untuk mendukung mengisi IKN di Kalimantan Timur dan menuju Indonesia Maju 2045. Selanjutnya di bawah ini penulis coba mengurai pokok-pokok pikiran dengan kerangka kerja, dan implisit berupa pertanyaan dan jawabannya. Kerangka pikir dan kerangka kerja dapat mengacu dan mengadaptasi konsep klasiknya Ralph W. Tyler (1902—1994) yang dimulai dari empat pertanyaan, yakni: (1) apa yang ingin dicapai pada Indonesia Maju 2045; (2) apa yang digunakan untuk mencapai Indonesia Maju 2045; (3) bagaimana cara mencapai Indonesia Maju 2045, dan (4) bagaimana cara mengetahui ketercapaian Indonesia Maju 2045. Pada aspek kurikulum, Kalimantan Timur konsisten mengikuti kurikulum nasional. Di samping itu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dibantu Perkumpulan Ahli Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia (PERAMUPADI) Pengurus Wilayah Kalimantan Timur, sejak tahun 2018 mengembangkan dan telah menghasilkan Kurikulum Muatan Lokal (Kurmulok) Kalimantan Timur yang terdiri dari Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Genetik (SDA & SDG), Seni Budaya, dan Bahasa Daerah. Adanya Kurmulok ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor. 48 Tahun 2017 tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Sekolah Menengah dan Sekolah Luar Biasa. Sementara ini tahap implementasi sudah mulai dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa se-Kalimantan Timur.

Pada aspek sarana dan prasarana, Pemprov Kalimantan Timur terus mengupayakan. Dengan jumlah 6.065 sekolah jenjang Dikdasmen di seluruh penjuru Kalimantan Timur, adalah tidak mudah untuk memenuhinya secara ideal. Idealnya, setiap sekolah memiliki: sejumlah ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktik, ruang pimpinan, ruang guru, ruang ibadah, ruang UKS, ruang toilet, ruang gudang, ruang sirkulasi, ruang Tata Usaha, ruang

konseling, dan ruang OSIS. Secara bertahap dipenuhi melalui APBD dan bantuan dari Dana Alokasi Khusus dari Pusat. Khusus untuk perguruan tinggi, Universitas Mulawarman sebagai PTN tertua dan terbesar di Kalimantan Timur telah dan sedang membangun terus dan melengkapi sarana dan prasarannya melalui bantuan dari Islamic Development Bank (IsDB) sebesar 700 milyar rupiah. Pada aspek pembiayaan, Pemrov Kalimantan Timur konsisten dengan 20% dari APBD. Dari besaran itu, 70% untuk peningkatan mutu dan 30% untuk fisik. Di samping itu juga dapat support APBN berupa DAK dan BOSNAS yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, misal di tahun 2019 sebesar 68 milyar, tahun 2020 sebesar 150 milyar, tahun 2021 sebesar 168 milyar, dan 2022 sebesar 169 milyar. Walau pun postur anggaran pendidikan sudah sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggaran sebesar 20%, tetapi untuk Kalimantan Timur dengan topografi wilayah yang sangat luas dan dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi untuk akses ke daerah pedalaman, terpencil dan terluar, maka anggaran sebesar itu belum menjamin tercapainya peningkatan mutu. Apa yang telah dieksplisitkan pada 2045 di variabel output dan kemungkinan perkembangan serta perubahannya secara dinamis perlu diantisipasi, juga kendali dan evaluasi pada proses agar berjalan *on the right track*. Evaluasi berlangsung dengan prinsip *on becoming process*. Berbagai kekurangan dan kelemahan yang ditemukan dalam perjalanannya, tempatkan sebagai bagian dari proses menjadi. Dari proses ini akan ada *feedback* sebagai informasikan untuk penyesuaian input.

2. Perencanaan Berbasis Data

Bangsa yang besar ditunjukkan dengan fakta kemajuan dalam perihal pendidikan. Dengan sistem pendidikan yang baik hingga diharapkan akan bisa

menciptakan lulusan maupun sumber daya manusia yang professional yang akan dapat bersaing di kancah internasional bersama dengan negara berkembang yang lain (Novan, 2011). Pada masa global seperti dikala ini, pembelajaran yang bermutu ialah sesuatu keharusan. Globalisasi diisyarati oleh adanya mega kompetisi dalam seluruh aspek kehidupan yang semakin terasa tidak mudah untuk bisa dihindari. Kosekuensinya, lembaga pendidikan di Indonesia di tuntutan untuk menciptakan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi. Untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tak hanya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi namun juga memiliki karakter kuat pemerintah merancang sebuah undang-undang tentang sistem pendidikan No. 20 Tahun 2003. Dalam UU tersebut pada pasal 3 menyatakan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan uraian diatas, maka pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia bangsa dan bernegara. Hal ini berarti masa depan suatu bangsa tidak terlepas dari pendidikan yang terus berkembang saat ini. Oleh karena itu, pendidikan harus berkesinambungan dan semakin maju dengan generasi penerus dan pemimpin bangsa yang akan datang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim, menerbitkan surat edaran No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar ataupun Kebebasan Belajar. Konsep kebebasan belajar, ialah membebaskan institusi pendidikan serta mendorong peserta didik

untuk berinovasi serta mendorong pemikiran kreatif. Konsep ini diterima mengingat visi misi pendidikan Indonesia ke depan demi terciptanya manusia yang bermutu serta mampu bersaing diberbagai bidang kehidupan (Sibagariang et al., 2021).

Terobosan merdeka belajar bertujuan guna memajukan pendidikan di Indonesia. Ide ini menggambarkan salah satu langkah yang sangat strategis serta inovatif yang menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Merdeka Belajar merupakan kebebasan lembaga pendidikan (sekolah, guru, serta peserta didik) dalam berinovasi, mandiri dan kreatif.

Merdeka belajar menekan terbentuknya kepribadian jiwa merdeka di mana guru serta siswa dapat secara bebas dan menyenangkan mengeksplorasi pengetahuan, perilaku dan keahlian dari lingkungan. Merdeka belajar bisa mendorong siswa belajar serta mengembangkan dirinya, membentuk perilaku peduli terhadap lingkungan di mana siswa belajar, mendesak keyakinan diri serta keahlian siswa dan gampang menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat (Dela & Khoirul Ainia, 2020). Oleh karena itu, keberadaan merdeka belajar sangat relevan dengan kebutuhan siswa serta tuntutan pendidikan di abad 21. Karena esensi merdeka belajar merupakan meletsakan pendidikan yang memerdekakan serta otonom baik guru maupun sekolah guna menginterpretasi kompetensi dasar dalam kurikulum sebagai penilaian guru (Dharma et al., 2020).

3. Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur Menuju Indonesia Emas

Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur berada pada urutan ke-3 setelah Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta. Cenderung meningkat, dari 75,83 pada 2018 menjadi 76,68 pada 2021. Pendidikan di Kalimantan Timur

memiliki kontribusi dalam pembentukan IPM. Sepengetahuan penulis, belum ada kajian khusus untuk melihat seberapa besar kontribusi pendidikan di provinsi ini terhadap IPM. Tetapi yang pasti, sejak 2009 telah banyak upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengungkit kualitas SDM melalui pendidikan. Terbitnya Perda Pendidikan No. 3/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Kebijakan Beasiswa Kalimantan Timur Cemerlang, pembangunan berbagai sarana pendidikan seperti Sekolah Khusus Olah Raga Bertaraf International (SKOI), *Education Centre*, dan pendirian dua perguruan tinggi negeri yakni Institut Teknologi Kalimantan (ITK), dan Institut Seni dan Budaya

Indonesia (ISBI), adalah sebagian bukti Kalimantan Timur telah melakukan EOE. Agar apa yang sudah terbangun dapat dipelihara, dilanjutkan dan dikembangkan, diperlukan kolaborasi multipihak sehingga lahir sinergi. Breakthrough, pemikiran lintas batas, dan keberanian taking risk adalah prasyarat EOE. Dengan EOE diharapkan ada lompatan kemajuan. Apakah yang telah dilakukan dan sedang dilakukan di Kalimantan Timur ini memadai untuk menopang keberadaan IKN di masa depan? Jawabannya tergantung pada tingkat pemahaman para pembuat kebijakan terhadap konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan, *Education for Sustainable Development* (EfSD), dan keputusan jenis tindak lanjutnya. EfSD merupakan pendidikan yang mendorong perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap untuk memungkinkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua. Dasar pijakan EfSD ada enam yakni: (1) pembelajaran seumur hidup; (2) fokus pada pembelajar; (3) pendekatan holistik; (4) beragam metode kerja demokratis; (5) berpikir mendalam; (5) belajar perspektif yang berbeda. Dari enam pijakan ini muncul harapan berupa

output pendidikan yakni lulusan yang berkarakter problem solver yang tangguh memasuki berbagai perubahan dan tantangan zaman. Sejauh pengetahuan penulis, praktik pendidikan di berbagai tingkat pendidikan di Kalimantan Timur telah mengarah kepada EfSD walau masih ada kekurangan di sana-sini. Dari penjelasan di atas yang penulis maksudkan sebagai frame dan warming up untuk pemikiran pendidikan di Kalimantan Timur menuju Nusantara sebagai IKN, maka selanjutnya coba penulis ungkap fenomena terkini. Uraian di bawah ini akan mengetengahkan sejumlah fenomena kependidikan di Kalimantan Timur untuk menjawab pertanyaan Panitia FGD dari Lemhannas RI terkait pengelolaan, prospek keberhasilan menuju Indonesia Maju 2045, upaya mewujudkan SDM dengan soft- skill dan berwawasan kebangsaan, dan akselerasi pencapaian program pendidikan menuju Indonesia Maju 2045.

Luas wilayah Kalimantan Timur adalah 129.066,64 kilometer persegi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur sekitar tiga juta delapan ratus jiwa, dan 21,99% tinggal di Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, yang luasnya hanya 0,59% dari wilayah Kalimantan Timur. Pertumbuhan penduduk 2,13%. Dengan melihat tren peningkatan IPM Kalimantan Timur dari tahun ke tahun yang cenderung naik, optimis Kalimantan Timur akan sukses menuju Indonesia Maju 2045. Pembangunan SDM dengan peta jalan yang jelas dan terukur dan dilakukan secara masif, konsisten dan sinergis menjadi jaminan keberhasilan. Kemampuan mempertahankan capaian-capaian positif di berbagai sektor dan kemauan berkreasi memberi nilai tambah secara dinamis sesuai tuntutan zaman adalah satu keniscayaan jika ingin berhasil. Oleh karena pengungkit SDM adalah pendidikan, maka sektor ini perlu dijaga kinerjanya dan berpegang teguh pada prinsip *continues improvement*, baik

pada upaya menaikkan kualitas, relevansi, tata kelola, maupun akses. Untuk Provinsi Kalimantan Timur, dari potensi dan capaian-capaian selama ini, optimis mampu mencapai Indonesia Maju 2045. Untuk sampai ke 2045 masih ada waktu 23 tahun. Rentang 23 tahun perlu dimanfaatkan membangun percepatan secara sinergis melalui penguatan komitmen, masifikasi diklat, internalisasi budaya maju, pengembangan sistem penilaian kinerja, penguatan program kepemimpinan, peningkatan kerja sama, penataan ulang manajemen SDM. Untuk semua, kebijakan yang memayunginya sangat menentukan keberhasilan. Kebijakan ini bisa diimprovisasi oleh pimpinan daerah sesuai zamannya dengan tetap melihat Peta Jalan Pendidikan yang telah dimilikinya. Dalam konteks yang lebih luas, potensi Kalimantan Timur harus dilihat dari Sumber Daya Alamnya (SDA), karena keunggulan Kalimantan Timur memang di SDA. SDA ini merupakan keunggulan komparatif, keunggulan bersifat *given*, pemberian dan berkah dari Tuhan Maha Kuasa. Adapun keunggulan kompetitif, merupakan keunggulan yang harus diraih lewat usaha, lewat kompetisi. Keunggulan SDM harus diperjuangkan, terjadinya karena usaha. Seberapa tinggi berkualitas SDM sangat tergantung seberapa sungguh-sungguh pemerintah mengupayakannya. Jepang, Singapura, Malaysia, Cina, Korea dan negaranagara lain di Asia yang maju itu berkat kesungguhan dan konsistensi pemerintahnya. Untuk SDM di Provinsi Kalimantan Timur, secara kualitatif tidak jauh berbeda dari SDM di provinsi lain. Kelebihan SDM Kalimantan Timur adalah heterogenitas, kombinasi dari ragam suku. Heterogenitas ini secara alamiah menjadikan terbiasa kompetisi untuk saling berkontribusi yang terbaik bagi daerahnya. Jadi, dimilikinya heterogenitas SDM ini merupakan potensi bagi Kalimantan Timur sebagai

provinsi yang kompetitif. Capaian IPM berada pada lima besar nasional selama lima belas tahun terakhir menunjukkan bahwa SDM Kalimantan Timur berpotensi melaju diajak berlari cepat menuju Indonesia Maju 2045. Posisi IKN yang berada di Kalimantan Timur menjadi pemicu atau trigger bagi percepatan peningkatan kualitas SDM, karena ini merupakan upaya Indonesia membangun kota baru yang smart, kota baru yang kompetitif di tingkat global, membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi Indonesia yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi dan green economy.

4. Akselerasi Pendidikan Kalimantan Timur Menuju Indonesia Maju 2045

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-4 terdapat 3 tujuan pemerintah Negara RI, yakni 3 tujuan internal: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu tujuan eksternal yakni: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada tujuan internal yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan. Apakah instrumen ini telah berfungsi secara optimal dapat menjadi bahan diskusi yang sangat panjang. Untuk menjadi bangsa maju, untuk menjadi daerah maju, boleh terpesona dulu dengan negara dan daerah lain yang lebih dahulu maju; dan secara pasti itu dicapai lewat instrumen pemerintah berupa pendidikan. Dapat dipastikan, di negara mana pun yang maju, untuk melompat dan melampaui kemajuan negara lain, pasti di situ terjadi percepatan memajukan pendidikan melebihi negara-negara lain. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan

Kalimantan Timur? Untuk Indonesia, serahkan kepada yang lebih berkompeten untuk membahas dan mengkajinya. Untuk Kalimantan Timur mari kita mulai dengan pertanyaan: apakah sudah terjadi akselerasi pendidikan? Apakah akselerasi itu diarahkan menuju Indonesia Maju 2045? Sepanjang pengetahuan penulis, usaha memajukan pendidikan di Kalimantan Timur telah dilakukan dengan baik. Minimal mengikuti standar-standar yang ditetapkan oleh Pusat. Baru pada tahun 2009, dimulai terobosan untuk melakukan percepatan dan ikhtiar untuk “melompat” dengan menerbitkan sejumlah kebijakan. Kebijakan tersebut, antara lain: merealisasikan APBD 20% untuk pendidikan; Wajib Belajar 12 Tahun; pemberian beasiswa Kalimantan Timur Cemerlang (Cerdas, Merata, prestasi Gemilang) yang sekarang dilanjutkan dengan Kalimantan Timur Tuntas; mendirikan dua perguruan tinggi negeri; mendirikan Sekolah Khusus Olah Raga bertaraf Internasional (SKOI); mendirikan *Education Center* sebagai pusat penelitian, diklat, dan pengembangan keilmuan untuk siswa-siswi dari SD-SLTA dan mahasiswa seKalimantan Timur; dan, pengiriman putra/putri terbaik Kalimantan Timur untuk belajar Ilmu Perkeretaapian di Rusia. Adanya pergantian kepemimpinan terbuka peluang improvisasi kebijakan, dan ini wajar sesuai dengan pertumbuhan masalah dengan dinamikanya. Hal yang perlu dipertahankan adalah konsistensi menuju Kalimantan Timur Maju dalam rangka Indonesia Maju 2045. Konsistensi dimaksudkan di sini adalah dalam kebijakan yang menjadi domain pimpinan daerah, dalam hal ini Gubernur di provinsi dan Bupati/Walikota di tingkat kabupaten dan kota. Simpul-simpul yang perlu dikuatkan di sektor pendidikan untuk terjadi percepatan ialah: guru, fasilitas, akses, kurikulum, relevansi, dan tata kelola. Jika mau belajar dari kemajuan pendidikan di Finlandia, sebagai negara termaju

pendidikannya, maka dua simpul utama yakni: guru yang berkualitas dan fasilitas sekolah yang lengkap itu merupakan pengungkit kemajuan. Pada Gambar 1 di atas dan penjelasannya dapat menjadi pemahaman pimpinan pendidikan di Kalimantan Timur, yakni apa yang telah dicapai dan gap yang harus diisinya sehingga pada 2045 Kalimantan Timur telah memiliki capaian sebagaimana harapan nasional. *Crucial point* bagi pelaku kebijakan di daerah adalah perlu dimilikinya Peta Jalan Pendidikan atau Garis-Garis Besar Haluan Pendidikan Kalimantan Timur. Darinya, step by step, cepat dan pasti Kalimantan Timur dapat melaju sepenuh arah. Dari situ pula Kalimantan Timur bisa berbuat lebih dari yang seharusnya.

4. SIMPULAN

Pendidikan merupakan instrumen untuk memajukan dan meningkatkan kualitas SDM. Kualitas SDM merupakan modal utama untuk memajukan negara. Bentuk kebijakan pendidikan dan implementasinya untuk memajukan bangsa dan negara merupakan cerminan *political will* pemerintah. Untuk daerah adalah *political will* pemerintah daerah. Milestone 2045 merupakan ukuran di saat itu seberapa berhasil kinerja pendidikan baik secara nasional maupun lokal-daerah. Untuk hari ini, 23 tahun sebelum sampai ke 2045, masih ada waktu untuk berbuat "lebih" sehingga ukuran-ukuran keberhasilan Indonesia Maju patut disematkan pada waktunya, termasuk kepada kepala-kepala daerah. Untuk Kalimantan Timur, perlu akselerasi menuju Indonesia Maju 2045. Apa yang telah dan sedang dilakukan nasional dikurangi dengan apa yang telah dan sedang dilakukan di Kalimantan Timur, itulah tantangannya. Sebagai misal, jika nasional telah melakukan 10 hal dan Kalimantan Timur baru 5 yang dilakukan, maka $10-5 = 5$ (gap). Gap ini perlu diisi dengan kebijakan percepatan, dengan *tools* akselerasi, dan SDM

pendukungnya. Tiga aktor utama di daerah untuk mendukung keberhasilan Provinsi Kalimantan Timur Menuju Indonesia Maju 2045 ialah: Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Lembaga-lembaga Pendidikan (Paud/Dikdas/Dikmen/Dikti), dan Masyarakat. Kolaborasi, sinergi, dan konsistensi dalam regulasi dan implementasi akan memungkinkan terjadinya akselerasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Gani, Lilik, "E-Learning is a Must, Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan", disampaikan dalam Workshop E-Learning di Universitas Indonesia, tanggal 29-31 Agustus 2006.
- K. Watkins, "*Human Development Report 2005*", United Nations Development Programme (UNDP), New York, 2005
- Kemdikbud, "Data Pokok Pendidikan Jenjang SMA-SMK", <http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/porta1/web/> diakses pada tanggal 09 Mei 2016.
- Mardhiyati, N., Maghfiroh, & Rima, A. (2023). Kurikulum Merdeka Belajar Berbasis Pembelajaran Berdiferensiasi di Madrasah Ibtidaiyah. 5(March), 85–100.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, "*Statistik Sekolah Menengah Atas (SMA) 2015/2016*", Setjen Kemdikbud, Jakarta, 2016.
- Rusman. *Belajar dan Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Sardjono, A., et al. (2022). Unmul Hebat, Kalimantan Timur Berdaulat, IKN Kuat: Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun. Mulawarman University Press. Wahyuni, A. S. (2022). *Literature review: pendekatan berdiferensiasi dalam pembelajaran ipa*. *Jurnal Pendidikan Mipa*, 12(2),

118-126.

- Sibagariang, D., Sihotang, H., & Murniarti, E. (2021). *Peran Guru Penggerak Dalam Pendidikan Merdeka Belajar Di Indonesia*. Suyanto dan Djihad Hisyam. (2000). *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, Ed.).
- Undang-Undang RI. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang RI. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.